

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA/BURUH ALIH DAYA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh :

SUPRAT
NPM : 17310005

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2019

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA/BURUH ALIH DAYA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Diajukan oleh :

Oleh :

SUPRAT
NPM : 17310005

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2019

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA/BURUH ALIH DAYA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

Diajukan oleh :

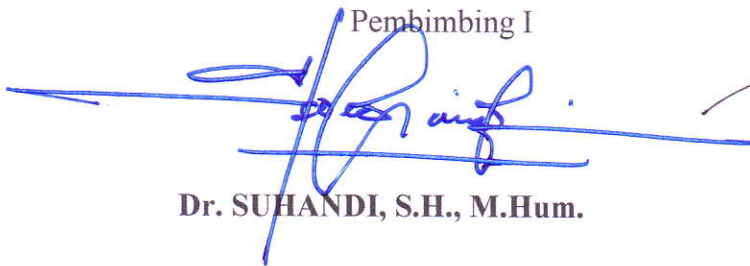
SUPRAT
NPM : 17310005

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI

Tanggal 9 Agustus 2019

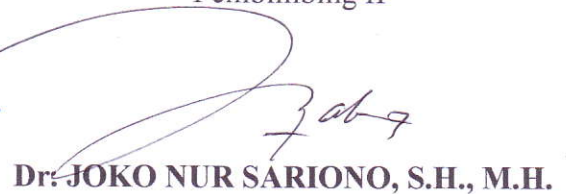
Oleh

Pembimbing I



Dr. SUHANDI, S.H., M.Hum.

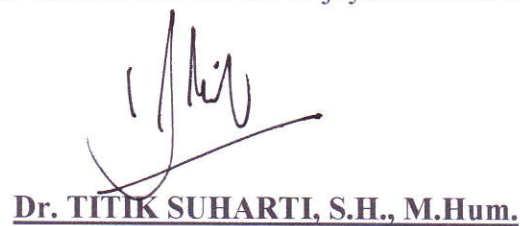
Pembimbing II



Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum.

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA/BURUH ALIH DAYA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003




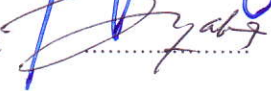
Dipersiapkan dan disusun oleh :

SUPRAT
NPM : 17310005

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal :

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji	Tanda tangan
Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum.	Ketua 
Dr. DWI TATAK SUBAGIYO, S.H., M.Hum.	Anggota 
Dr. SUHANDI, S.H., M.Hum.	Anggota 
Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.	Anggota 

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Tanggal

Ketua Program Studi Magister Hukum


Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

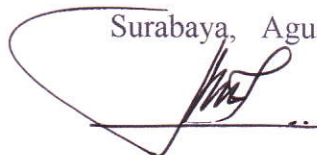
Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya.

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL(K), selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
3. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum.
4. Dr. Suhandi, S.H., M.Hum. dan Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, dorongan dengan sabar dan telaten.
5. Para Dosen Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama pendidikan.
6. Keluargaku yang telah memberikan dorongan semangat hingga selesainya penyusunan tesis ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi S2 Magister Hukum UWKS, serta pihak-pihak lain, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, Agustus 2019



Suprat

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suprat

NPM : 17310005

Alamat : Griya Citra Asri RM 12A/24 RT. 002 RW. 007
Kel. Sememi Kec. Benowo, Surabaya

No. Telp (HP) : 087855957577 / 081252322272

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM PEERJA/BURUH ALIH DAYA AIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 12 Agustus 2019
Yang Menyatakan,


SUPRAT

DAFTAR ISI

	HALAMAN
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
1. Alih Daya atau <i>Outsourcing</i>	11
2. Unsur-Unsur <i>Outsourcing</i> Yang Mempengaruhi	
Definisi <i>Outsourcing</i>	12
3. Hubungan Industrial	15
F. Metode Penelitian	19
G. Objek dan Subjek Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan	24

BAB II	PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ATAU BURUH AKIBAT ALIH DAYA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN	26
A.	Pertanggungjawaban Hukum dan Hak Pekerja <i>Outsourcing</i>	26
B.	Problem terkait Penentuan Pekerjaan Utama (<i>Core Business</i>) dan Pekerjaan Penunjang (<i>Non Coree Business</i>) dalam Perusahaan sebagai Dasar Pelaksanaan <i>Outsourcing</i>	30
C.	Penyelesaian Perselisihan Terkait <i>Outsourcing</i>	35
D.	Pengawasan Ketenagakerjaan	38
E.	Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial	40
BAB III	UPAYA HUKUM PEKERJA YANG DIRUGIKAN KETIKA TERJADI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA	43
A.	PHK Yang Dilarang dan Yang Diperbolehkan	43
B.	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Di PHK	46
BAB IV	PENUTUP	50
1.	Kesimpulan	50
2.	Saran	52
DAFTAR PUSTAKA		

ABSTRAK

Tesis yang berjudul Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Alih Daya Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bertujuan: *Pertama*, untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pekerja atau buruh akibat alih daya dalam hubungan industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *kedua*, untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang bisa dilakukan pekerja outsourcing yang dirugikan ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: *Pertama*, Dasar undang-undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 111 mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO *Convention* No. 81 *Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce* (Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356). Perundang-undangan: Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan lain; Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE.04/MEN/VIII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Nomor 1753 Kepmenaker). *Kedua*, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan yang dilakukan mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja alih daya dan konsistensi pengaturan tenaga kerja alih daya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang etenagakerjaan dan Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan kepada perusahaan lain, maka dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun perlindungan hukum bagi tenaga kerja alih daya sudah dicantumkan dalam PKWT tenaga kerja tersebut masih belum merasa terlindungi karena di dalam PKWT antara penyedia tenaga kerja dengan tenaga kerja alih daya dalam praktik masih terdapat klausula yang kurang memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja alih daya.

Kata Kunci: alih daya, hubungan industrial, pekerja atau buruh, pengaturan

ABSTRACT

The thesis entitled Protection of Workers/Workers Outsourcing Caused Termination of Employment Under Law Number 13 of 2003 aims: First, to find out how legal liability to workers or laborers due to outsourcing in industrial relations based on Law Number 13 of 2003 concerning Labor, secondly, to find out how legal remedies can be done by outsourced workers who are disadvantaged when there is Termination of Employment.

Based on the results of the study it can be concluded: First, the legal basis, namely: Law Number 21 of 1999 concerning Ratification of ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in Employment and Occupation; Law Number 21 Year 2003 concerning Ratification of ILO Convention No. 81 Concerning Labor Inspection in Industry and Commerce (ILO Convention No. 81 Concerning Labor Inspection in Industry and Trade) (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 91, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4309); Law Number 13 of 2003 concerning Manpower (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 39, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4279); Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes (Statute Book of the Republic of Indonesia Number 6 of 2004, Supplement to Statute Book of the Republic of Indonesia Number 4356). Legislation: Presidential Regulation Number 21 Year 2010 concerning Labor Inspection; Regulation of the Minister of Manpower Number 19 of 2012 concerning Terms of Submission of Partial Execution of Work to Other Companies; Circular of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number: SE.04 / MEN / VIII / 2013 concerning Guidelines for Implementing Permenaker Number 19 of 2012 Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 33 of 2016 concerning Procedures for Labor Inspection. (State Gazette Number 1753 Kepmenaker). Secondly, based on the results of research obtained and discussions conducted regarding legal protection for outsourced workers and the consistency of outsourcing labor arrangements. Pursuant to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Manpower and Transmigration Regulation Number 19 of 2012 concerning the conditions for handover of part of the implementation to other companies, it can be concluded that although legal protection for outsourced workers has been included in the PKWT, the workers still do not feel protected because in the PKWT between providers of labor and outsourcing workers in practice there are still clauses that do not provide legal protection for outsourced workers.

Keywords: *outsourcing, industrial relations, workers or laborers, regulation*